

Implementasi Kebijakan Work From Home sebagai Strategi Mitigasi Cost-Push Inflation akibat Kenaikan Harga BBM di Kota Kupang

Amelia Irnawati Nendong¹, Benediktus Deisman Mantur², Chelsea Nelci Reny Kolobani³, Delma Dassi⁴,
Doni Christian Umbu Hadameha⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

Email: chelseanelcirenkolobani@gmail.com

Abstract. *The increase in fuel prices has had a significant impact on inflation, particularly cost-push inflation resulting from rising production and distribution costs. This condition is also felt in Kupang City, the center of economic activity in East Nusa Tenggara Province, which is highly dependent on land transportation. This study aims to analyze the implementation of the Work From Home (WFH) policy as an adaptive strategy for local governments to reduce inflationary pressures caused by rising fuel prices and to identify factors influencing its successful implementation, based on the perspective of George C. Edwards III. The study uses a qualitative descriptive approach based on literature studies, utilizing secondary data in the form of scientific journals, reports from the Central Statistics Agency (BPS), government documents, and relevant previous research. The results show that the implementation of WFH is able to reduce employee mobility, fuel consumption, and transportation and agency operational costs. However, the effectiveness of this policy is still influenced by limitations in digital infrastructure, internet network quality, human resource readiness, and a bureaucratic structure that is not yet fully adaptive to digital work systems. Based on the Edwards III policy implementation model, communication factors, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure are important aspects in determining the success of WFH implementation. Thus, WFH can be understood as an adaptive and complementary public policy strategy to address inflationary pressures resulting from rising fuel prices in Kupang City.*

Keywords: *Work From Home, public policy, inflation, fuel price increases, cost-push inflation, Kupang City.*

Abstrak. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inflasi, khususnya cost-push inflation yang terjadi akibat naiknya biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini turut dirasakan di Kota Kupang sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam mereduksi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya berdasarkan perspektif George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WFH mampu mengurangi mobilitas pegawai, penggunaan BBM, serta biaya transportasi dan operasional instansi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, kualitas jaringan internet, kesiapan sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem kerja digital. Berdasarkan model implementasi kebijakan Edwards III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi WFH. Dengan demikian, WFH dapat dipahami sebagai strategi kebijakan publik yang bersifat adaptif dan komplementer dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang.

Kata Kunci: Work From Home, kebijakan publik, inflasi, kenaikan harga BBM, cost-push inflation, Kota Kupang

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* Chelsea Nelci Reny Kolobani. Email: chelseanelcirenkolobani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan persoalan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. BBM berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi karena berkaitan langsung dengan transportasi, distribusi barang, dan biaya produksi. Ketika harga BBM meningkat, biaya operasional di berbagai sektor ikut mengalami kenaikan sehingga memicu terjadinya inflasi. Dalam kajian ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi (Mankiw, 2018). Dampak inflasi tidak hanya terlihat pada kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga pada menurunnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang dimiliki tidak meningkat secara seimbang dengan kenaikan kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, kenaikan harga BBM menjadi persoalan yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi nasional, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingginya mobilitas masyarakat menjadikan aktivitas ekonomi di Kota Kupang sangat bergantung pada transportasi darat, baik untuk kegiatan perdagangan, distribusi barang, maupun aktivitas perkantoran. Akibatnya, kenaikan harga BBM menyebabkan meningkatnya biaya perjalanan dan distribusi barang sehingga harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menyesuaikan pola konsumsi dan mengurangi pengeluaran tertentu agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi (Sukirno, 2016). Selain itu, instansi pemerintah maupun sektor formal lainnya juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional, terutama yang berkaitan dengan mobilitas pegawai dan penggunaan transportasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki pengaruh terhadap meningkatnya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Penelitian Lestari dan Asyiqin (2022) menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM berdampak signifikan terhadap inflasi melalui peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang. Penelitian Tamba dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM menyebabkan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penelitian Bloom (2021) menyatakan bahwa sistem Work From Home (WFH) mampu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya transportasi pegawai. Barrero, Bloom, dan Davis (2021) juga menjelaskan bahwa WFH menjadi strategi kerja yang efektif dalam mengurangi mobilitas serta biaya operasional organisasi. Selain itu, Cucolas dan Russo (2021) menemukan bahwa efektivitas WFH sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan komunikasi organisasi.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas dampak kenaikan BBM terhadap inflasi dan implementasi WFH secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan kerja dan dinamika inflasi daerah. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengintegrasikan perspektif implementasi kebijakan publik dengan tekanan inflasi daerah secara empiris, khususnya pada wilayah berkembang seperti Kota Kupang yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat. Padahal, kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi kebijakan kerja guna mengurangi mobilitas dan menekan biaya operasional. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji bagaimana kebijakan WFH diterapkan sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan cost-push inflation akibat kenaikan harga BBM.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan

struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori ini menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, teori Edwards III digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan WFH dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Work From Home (WFH) dalam mereduksi tekanan cost-push inflation akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang?. Kemudian faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Work From Home (WFH) berdasarkan perspektif Edwards III?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan strategi adaptasi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan kerja yang lebih adaptif, efektif, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kesiapan organisasi di tengah tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara kebijakan Work From Home (WFH) dan tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana kebijakan WFH diposisikan sebagai strategi adaptif pemerintah dalam merespons tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

Metode studi literatur digunakan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara inflasi, kenaikan harga BBM, dan kebijakan WFH dalam perspektif kebijakan publik. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, inflasi daerah, dan sistem kerja jarak jauh.

Penelitian difokuskan pada Kota Kupang karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cukup terdampak oleh kenaikan harga BBM. Tingginya mobilitas masyarakat dan ketergantungan terhadap transportasi darat menyebabkan tekanan inflasi lebih terasa, terutama pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok. Dalam kondisi tersebut, kebijakan WFH dipandang sebagai salah satu alternatif kebijakan yang dapat membantu mengurangi mobilitas dan biaya operasional.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data tersebut meliputi laporan inflasi Badan

Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, dokumen kebijakan pemerintah terkait WFH, jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi tema penelitian, tahun publikasi, keterkaitan dengan kebijakan WFH dan inflasi daerah, serta kredibilitas sumber ilmiah yang digunakan. Literatur yang diprioritaskan berasal dari jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan sumber akademik yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan statistik, arsip kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan inflasi daerah dan kebijakan WFH. Melalui kedua teknik tersebut, penelitian berupaya menghubungkan berbagai informasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan content analysis (analisis isi) secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan informasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis, peneliti mengidentifikasi keterkaitan antara kenaikan harga BBM, tekanan inflasi daerah, dan kebijakan WFH berdasarkan berbagai sumber literatur dan dokumen yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai kebijakan Work From Home (WFH) sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM di Kota Kupang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Inflasi Kota Kupang Tahun 2022-2024

Tahun	Tingkat Inflasi	Sektor Dominan
2022	6,73%	Transportasi dan Bahan Bakar
2023	2,71%	Makanan, Transportasi dan Energi
2024	2,81%	Transportasi dan Energi

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang, Data Inflasi Kota Kupang Tahun 2022–2024.

Berdasarkan data pada Tabel 1, tingkat inflasi di Kota Kupang mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,73% yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan biaya transportasi. Pada tahun 2023 tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 2,71%, meskipun sektor transportasi dan energi masih menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Selanjutnya, pada tahun 2024 inflasi kembali meningkat menjadi 2,81% yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memberikan pengaruh terhadap peningkatan inflasi dan biaya hidup masyarakat di Kota Kupang.

Tabel 2. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Biaya Operasional dan Mobilitas kerja di Kota Kupang

Aspek	Sebelum Kenaikan BBM	Setelah Kenaikan BBM
Biaya transportasi pegawai	Realtif stabil	Meningkat
Pengeluaran operasional	Normal	Bertambah
Mobiltas pegawai	Tinggi	Berkurang
Penggunaan kendaraan	Stabil	Lebih hemat
Beban pengeluaran masyarakat	Sedang	Meningkat
Efektifitas WFH	Belum Optimal	Mulai diterapkan sebagai Alternatif

Sumber: Data diolah dari Sukirno (2016),BPS Kota Kupang (2024), dan laporan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi pegawai dan pengeluaran operasional instansi. Peningkatan biaya tersebut terjadi karena sebagian besar aktivitas kerja dan distribusi pelayanan publik di Kota Kupang masih bergantung pada transportasi darat. Akibatnya, instansi pemerintah maupun masyarakat harus mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi makro, tetapi juga berdampak pada efisiensi operasional organisasi dan stabilitas pengeluaran rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi, meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya tekanan cost-push inflation di daerah. Di sisi lain, Implementasi Work From Home (WFH) mulai dipandang sebagai strategi adaptif untuk mengurangi mobilitas dan pengeluaran transportasi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan kemampuan organisasi dalam menerapkan sistem kerja daring secara optimal

Tabel 3. Analisis Dampak Implementasi Work From Home (WFH) terhadap Efisiensi Biaya dan Tekanan Inflasi di Kota Kupang

Aspek Implementasi WFH	Kondisi yang Terjadi	Dampak terhadap Inflasi dan Biaya
Pengurangan mobilitas pegawai dan mahasiswa	Aktivitas perjalanan menuju kantor dan kampus menurun.	Penggunaan BBM dan biaya transportasi harian berkurang.
Efisiensi pengeluaran operasional	Instansi mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan biaya operasional kantor.	Pengeluaran operasional menjadi lebih terkendali.
Keterbatasan fasilitas teknologi	Tidak semua pegawai dan mahasiswa memiliki perangkat memadai.	Efektivitas kerja daring belum merata.
Efisiensi waktu kerja dan belajar	Waktu perjalanan dialihkan untuk aktivitas produktif.	Produktivitas tertentu meningkat.
Fleksibilitas sistem kerja	Aktivitas administrasi dan akademik dilakukan secara daring.	Pelayanan dan pembelajaran tetap berjalan.

Keterbatasan jaringan internet	Gangguan koneksi masih sering terjadi di beberapa wilayah.	Koordinasi kerja dan pembelajaran daring terganggu.
Kesiapan organisasi	Sebagian instansi masih menggunakan pola kerja konvensional.	Koordinasi dan pengawasan daring belum maksimal.
Dampak terhadap tekanan ekonomi masyarakat	Pengeluaran transportasi masyarakat cenderung menurun	Beban biaya harian dapat ditekan

Sumber: Data diolah dari Bloom (2021), Barrero, Bloom, dan Davis (2021), serta dokumen kebijakan Work From Home pemerintah.

Berdasarkan Tabel 3, implementasi Work From Home (WFH) memberikan dampak positif dalam mengurangi mobilitas pegawai dan mahasiswa sehingga penggunaan BBM serta biaya transportasi dapat ditekan. Pengurangan aktivitas perjalanan menuju kantor dan kampus turut membantu meningkatkan efisiensi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga BBM. Selain itu, fleksibilitas kerja dan pembelajaran daring menunjukkan bahwa WFH dapat berfungsi sebagai strategi adaptif dalam mengurangi tekanan biaya operasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan WFH masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan ketersediaan fasilitas teknologi. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat pendukung menunjukkan bahwa implementasi WFH di Kota Kupang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, keberhasilan WFH tidak hanya bergantung pada kebijakan organisasi, tetapi juga pada dukungan sumber daya teknologi dan kesiapan daerah dalam mendukung sistem kerja jarak jauh.

Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Inflasi di Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Kupang. Pengaruh tersebut paling terasa pada sektor transportasi, distribusi barang, serta kebutuhan pokok masyarakat. Ketika harga BBM meningkat, biaya operasional ikut bertambah sehingga harga barang di pasar juga mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, tetapi juga oleh naiknya biaya produksi dan distribusi barang. Dalam kajian ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai cost-push inflation (Mankiw, 2018).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Asyiqin (2022) yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang. Penelitian Tamba dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM menyebabkan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Namun, dalam konteks Kota Kupang, dampak tersebut cenderung lebih besar karena struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan aktivitas perdagangan. Kondisi geografis Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebabkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM.

Hampir seluruh distribusi kebutuhan pokok dari pelabuhan menuju pasar maupun toko-toko menggunakan kendaraan berbahan bakar BBM. Akibatnya, ketika harga BBM naik, biaya distribusi ikut meningkat dan berpengaruh langsung pada harga barang di tingkat konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kota Kupang mulai merasakan peningkatan pengeluaran, terutama untuk kebutuhan transportasi dan rumah tangga. Biaya perjalanan

menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Selain itu, pedagang kecil di pasar tradisional juga mulai menyesuaikan harga barang karena meningkatnya biaya pengiriman dari distributor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Kenaikan biaya transportasi pada akhirnya memperbesar tekanan ekonomi rumah tangga karena harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan masyarakat. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga dan memperluas tekanan sosial ekonomi masyarakat daerah.

Selain dipengaruhi kenaikan harga BBM, fluktuasi inflasi di Kota Kupang juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pola distribusi barang, kondisi cuaca, dan perubahan konsumsi masyarakat. Penurunan inflasi pada tahun 2023, misalnya, tidak hanya dipengaruhi oleh stabilisasi harga BBM, tetapi juga faktor musiman dan upaya pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, inflasi daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai dampak ekonomi nasional, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi lokal yang memengaruhi struktur biaya dan distribusi barang di daerah.

Implementasi Kebijakan Work From Home (WFH)

Di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan BBM, kebijakan Work From Home (WFH) mulai dipandang sebagai salah satu strategi adaptif pemerintah untuk mengurangi beban biaya operasional pegawai maupun instansi. Melalui sistem kerja dari rumah, pegawai tidak harus melakukan perjalanan setiap hari menuju kantor sehingga pengeluaran transportasi dapat ditekan. Dalam konteks Kota Kupang, kebijakan ini cukup relevan karena sebagian besar pegawai masih bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi umum untuk bekerja.

Efektivitas kebijakan WFH dalam mengurangi tekanan biaya operasional terjadi karena berkurangnya mobilitas harian pegawai sehingga penggunaan BBM dan biaya transportasi dapat ditekan. Pengurangan aktivitas perjalanan menuju kantor menyebabkan pengeluaran harian pegawai menjadi lebih efisien, terutama di tengah meningkatnya harga BBM. Selain itu, waktu perjalanan yang sebelumnya digunakan untuk mobilitas dapat dialihkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas produktif lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Barrero, Bloom, dan Davis (2021) yang menjelaskan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu mengurangi biaya operasional organisasi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja.

Penerapan WFH juga memberikan dampak pada efisiensi operasional instansi pemerintah. Penggunaan listrik, bahan bakar kendaraan dinas, serta kebutuhan operasional kantor dapat dikurangi ketika sebagian pegawai bekerja dari rumah. Dengan demikian, manfaat WFH tidak hanya dirasakan oleh pegawai secara individu, tetapi juga membantu instansi mengurangi pengeluaran di tengah meningkatnya biaya energi. Penelitian Bloom (2021) juga menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu meningkatkan efisiensi kerja apabila didukung oleh kesiapan teknologi dan komunikasi organisasi yang memadai.

Meskipun demikian, implementasi WFH di Kota Kupang belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan infrastruktur digital dan kesiapan organisasi. Beberapa wilayah masih memiliki kualitas jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses koordinasi dan penyelesaian pekerjaan secara daring sering mengalami hambatan. Selain itu, tidak semua pegawai memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung sistem kerja jarak jauh. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas WFH sangat dipengaruhi oleh

kesiapan sumber daya teknologi dan kapasitas organisasi dalam mendukung transformasi kerja digital.

Selain faktor teknologi, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara daring. Pada instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kehadiran pegawai di kantor tetap diperlukan agar pelayanan publik tidak terganggu. Oleh karena itu, implementasi WFH di Kota Kupang cenderung dilakukan secara terbatas dan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan masing-masing instansi. Dalam konteks ini, WFH belum dapat diterapkan sebagai solusi utama dalam menghadapi dampak inflasi BBM, tetapi lebih tepat dipahami sebagai strategi pendukung untuk mengurangi tekanan biaya operasional, khususnya pada sektor transportasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi WFH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung implementasi WFH adalah kebutuhan untuk mengurangi pengeluaran transportasi di tengah kenaikan harga BBM. Bagi sebagian pegawai, sistem kerja dari rumah membantu mengurangi biaya harian yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan bakar atau membayar transportasi umum. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mempermudah pelaksanaan rapat daring, koordinasi pekerjaan, dan pengiriman dokumen secara online.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Cucolas dan Russo (2021) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem kerja jarak jauh. Pemanfaatan aplikasi rapat daring dan sistem administrasi digital membantu organisasi tetap menjalankan aktivitas kerja meskipun pegawai tidak berada di kantor secara langsung. Dalam konteks Kota Kupang, perkembangan teknologi digital mulai mendorong perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.

Namun demikian, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan implementasi WFH belum berjalan optimal. Infrastruktur digital masih menjadi kendala utama, terutama terkait kualitas jaringan internet dan ketersediaan perangkat kerja yang memadai. Di beberapa wilayah Kota Kupang, akses internet belum stabil sehingga menghambat komunikasi dan penyelesaian pekerjaan secara daring. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas kerja pegawai menjadi tidak merata.

Selain itu, keterbatasan kemampuan teknologi sebagian pegawai juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan WFH. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan sistem digital sehingga proses adaptasi terhadap pola kerja baru memerlukan waktu dan pelatihan tambahan. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknologi yang tersedia.

Dalam pandangan peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa WFH belum dapat diterapkan secara penuh sebagai solusi utama dalam menghadapi tekanan inflasi akibat kenaikan BBM. Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai strategi adaptif dan komplementer yang membantu mengurangi mobilitas dan biaya operasional masyarakat. Dengan demikian, efektivitas WFH tetap dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, karakteristik pekerjaan, dan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan pola kerja baru di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Analisis Implementasi Kebijakan Perspektif Edwards III

Implementasi kebijakan WFH di Kota Kupang dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya (resources), disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, implementasi WFH memerlukan penyampaian aturan dan mekanisme kerja yang jelas kepada pegawai. Pegawai perlu memahami target kerja, sistem pelaporan, serta pola koordinasi selama bekerja dari rumah. Komunikasi yang tidak berjalan efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan menurunnya produktivitas kerja. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi WFH sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun sistem komunikasi kerja daring yang efektif.

Faktor sumber daya (resources) menjadi aspek yang paling menentukan dalam implementasi WFH di Kota Kupang. Ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi, dan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem digital sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah menunjukkan adanya kelemahan pada aspek resources dalam model Edwards III. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi WFH belum dapat berjalan optimal secara merata. Dalam perspektif Edwards III, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Sementara itu, faktor disposisi berkaitan dengan sikap dan penerimaan pegawai terhadap kebijakan WFH. Sebagian pegawai mendukung kebijakan ini karena dianggap mampu mengurangi biaya transportasi dan memberikan fleksibilitas kerja. Namun, terdapat pula tantangan dalam menjaga disiplin dan produktivitas kerja ketika pengawasan dilakukan secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh komitmen dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sistem kerja baru.

Faktor terakhir adalah struktur birokrasi yang berkaitan dengan pola koordinasi dan pembagian tugas dalam instansi. Struktur birokrasi yang masih bersifat konvensional dapat menghambat fleksibilitas kerja jarak jauh. Beberapa pelayanan publik masih membutuhkan kehadiran fisik pegawai sehingga sistem kerja daring belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian mekanisme birokrasi dan transformasi administrasi digital agar implementasi WFH dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Implikasi Kebijakan Publik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung efektivitas kebijakan kerja jarak jauh. Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas jaringan internet pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses digital agar implementasi WFH dapat berjalan lebih optimal dan merata di Kota Kupang.

Selain itu, instansi pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendukung kerja daring, seperti perangkat teknologi dan sistem administrasi digital yang memadai. Pelatihan penggunaan teknologi digital juga penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan sistem kerja berbasis teknologi.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih jelas terkait mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, dan standar operasional pelaksanaan WFH. Dengan

adanya aturan yang jelas, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam jangka panjang, penerapan WFH dapat menjadi bagian dari transformasi birokrasi digital di daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan kerja fleksibel dan pengendalian tekanan inflasi daerah dapat menjadi model adaptasi ekonomi lokal di tengah kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya dipahami sebagai sistem kerja alternatif, tetapi juga sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam mengurangi mobilitas dan menekan biaya operasional masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terbukti memberikan pengaruh terhadap meningkatnya inflasi di Kota Kupang, terutama pada sektor transportasi, energi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga BBM menyebabkan bertambahnya biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat sehingga harga kebutuhan pokok ikut mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Dampak inflasi tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi makro, tetapi juga memengaruhi daya beli dan stabilitas pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Kupang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan Work From Home (WFH) menjadi salah satu strategi adaptif yang digunakan untuk mengurangi mobilitas serta menekan biaya transportasi dan pengeluaran operasional. Penerapan WFH dinilai mampu menciptakan efisiensi biaya dan fleksibilitas kerja karena pegawai tidak perlu melakukan perjalanan setiap hari menuju kantor. Selain itu, pengurangan mobilitas turut membantu menekan penggunaan BBM sehingga dapat mengurangi tekanan biaya operasional masyarakat maupun instansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa WFH berperan sebagai instrumen kebijakan komplementer dalam mitigasi inflasi berbasis biaya (cost-push inflation mitigation), khususnya melalui pengurangan mobilitas dan efisiensi pengeluaran transportasi.

Meskipun demikian, implementasi WFH di Kota Kupang belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kualitas jaringan internet yang belum merata, serta jenis pekerjaan tertentu yang masih membutuhkan kehadiran langsung di kantor. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem kerja jarak jauh.

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan WFH dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan sumber daya digital menunjukkan bahwa aspek resources masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan WFH di Kota Kupang. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan WFH tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan teknologi, dukungan organisasi, dan kemampuan birokrasi dalam menyesuaikan pola kerja berbasis digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan kerja fleksibel dan pengendalian tekanan inflasi daerah dapat menjadi model adaptasi ekonomi lokal di tengah kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya dipahami sebagai sistem kerja alternatif, tetapi juga sebagai strategi kebijakan publik yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi.

REFERENSI

- Aksoy, C. G., Barrero, J. M., Bloom, N., Davis, S. J., Dolls, M., & Zarate, P. (2024). Why does working from home vary across countries and people? National Bureau of Economic Research.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan inflasi dan stabilitas harga konsumen Indonesia.
- Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2021). Why working from home will stick. National Bureau of Economic Research.
- Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G., & TuYe, H. Y. (2020). COVID-19 and remote work: An early look at US data. National Bureau of Economic Research.
- Deole, S. S., Deter, M., & Huang, Y. (2023). Time savings when working from home. National Bureau of Economic Research.
- George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, R., & Anwar, M. (2022). Tantangan implementasi work from home pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Juliana, R. P., dkk. (2022). Instruksi Refokus dan Relokasi APBD dalam Upaya Meminimalkan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Transformasi digital dalam reformasi birokrasi.
- Lestari, F. D., & Asyiqin, H. (2022). Kenaikan Harga BBM dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 3(2), 87–96.
- Malik, M. Z. F., Razak, A. R., & Sabir. (2025). Kajian Determinasi Kenaikan Harga BBM pada Penghasilan Pengemudi Transportasi Online. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 4(1).
- N. Gregory Mankiw. (2019). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Publik di Era Digital. Gava Media.
- Sarbaini, & Nazaruddin. (2022). Pengaruh Kenaikan BBM terhadap Laju Inflasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 2(1).
- Yuliana, D., & Hartono, B. (2023). Policy Implementation of Remote Working in Local Government Institutions. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 66–79.